

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUMAH PEMONDOKAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG RUMAH
PEMONDOKAN DI KABUPATEN JEMBER
(Studi Tentang Ijin Usaha Rumah Pemandokan Berdasarkan Pasal 4)**

*The Implementation Of Lodging House Policy Based On The Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2008 About The Lodging House In Jember
(The Study Of The Lodging House Business Based On Subsection 4)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh

**Rangga Tri Andhika P
NIM 040910201154**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2010**

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku ayahanda Rofi'I dan ibunda Endang Palupi serta teruntuk keluarga besar Rofi';
2. Civitas akademika diseluruh dunia;
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Bukanlah yang terkuat yang bertahan, tapi yang paling adaptif”

(Charles Darwin)*

* Piliang, Yasraf Amir, 2009. *posrealitas : realitas kebudayaan dalam era posmetafisika*. Yogyakarta: Jalasutra, Yogyakarta

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rangga Tri Andhika P

Nim : 040910201154

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul implementasi kebijakan rumah pemondokan berdasarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2008 tentang rumah pemondokan di Kabupaten Jember (studi kasus tentang ijin usaha rumah pemondokan berdasarkan pasal 4) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 desember 2010

Yang menyatakan

Rangga Tri Andhika P

Nim 040910201154

Skripsi

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUMAH PEMONDOKAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG RUMAH
PEMONDOKAN DI KABUPATEN JEMBER
(Studi kasus tentang izin usaha rumah pemonudukan berdasarkan pasal 4)**

Oleh

Rangga Tri Andhika P

Nim 040910201154

Pembimbing

Dosen pembimbing I : Drs Agus Suharsono. M,Si

Dosen pembimbing II : Selfi Budi helpiastuti. S,Sos. M,Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul ” Implementasi Kebijakan Rumah Pemdokan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rumah Pemdokan Di Kabupaten Jember (Studi Tentang Ijin Usaha Rumah Pemdokan Berdasarkan Pasal 4) ” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari/ tanggal : 18 Januari 2011

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris

Drs. Anwar, M. Si
NIP 194607281977031001

Drs. Agus Suharsono, M.Si
NIP 196308141989031023

Anggota

1. Selfi Budi H, S.Sos, M.Si (.....)
NIP 197003221995122001
2. Drs. Supranoto, M.Si (.....)
NIP 196102131988021001
3. M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP (.....)
NIP 197410072000121001

Mengesahkan

Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A
NIP 196108281992011001

RINGKASAN

Implementasi Kebijakan Rumah Pemdokan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rumah Pemdokan Di Kabupaten Jember (Studi Kasus Tentang Ijin Usaha Rumah Pemdokan Berdasarkan Pasal 4);
Rangga Tri Andhika P; 040910201154; 2010: 82 halaman; Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Rumah pemdokan adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang disewakan oleh pemiliknya kepada orang lain baik berjumlah satu orang maupun lebih dari satu orang. Peningkatan jumlah usaha rumah pemdokan di Kabupaten Jember tidak terlepas dari meningkatnya jumlah mahasiswa dari luar Kabupaten Jember

Lokasi rumah pemdokan di Kabupaten Jember terpusat di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari. Hal ini dikarenakan kelurahan sumbersari memiliki 3 universitas swasta dan negeri. Jumlah rumah pemdokan yang banyak, berdampak pada kurangnya perhatian pemilik rumah pemdokan terhadap kesehatan atau kelayakan apa yang disebut rumah pemdokan.

Dengan demikian pemerintah Kabupaten Jember membuat peraturan daerah nomor 7 tahun 2008 tentang rumah pemdokan. Dinas Sosial menjadi penanggung jawab sepenuhnya dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Agar memudahkan penerapan kebijakan, Dinas Sosial beserta beberapa instansi terkait membuat suatu tim sebagai pelaksana kebijakan.

Namun demikian, implementasi kebijakan tidak berjalan dengan lancar. Hal ini diduga dikarenakan tidak ada danya yang mendukung kebijakan tersebut dan komunikasi yang buruk didalam internal tim teknis pelaksanaan kebijakan rumah pemdokan. Tujuan dari penelitian ini adalah Memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan positif bagi Pemerintah di

dalam mengeluarkan kebijakan serta melaksanakan kebijakan rumah pemondokan secara baik.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe deskriptif dengan paradigma kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan inti dan informan triangulasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan ukuran-ukuran implementasi kebijakan menurut Van Horn dan Van Meter, kebijakan rumah pemondokan tidak berjalan dengan baik.

Hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini terutama pada sumber-sumber kebijakan seperti dana pelaksanaan yang hingga sekarang belum terencana. Selain itu, komunikasi antar lembaga tidak berjalan dengan baik. Adapun beberapa factor lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kebijakan rumah pemondokan berdasarkan perda nomor 7 tahun 2008 tidak memiliki sanksi apapun selain sanksi administrasi.

Dari hasil penelitian, peneliti menyarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Jember agar lebih memerhatikan sanksi-sanksi tegas bila pemilik rumah pemondokan tidak memiliki ijin usha rumah pemondokan di Kabupaten Jember. Sehingga, sanksi akan menjadi alasan bagi pemilik rumah pemondokan menaati kebijakan peraturan daerah nomor 7 tahun 2008 tentang rumah pemondokan di Kabupaten Jember.

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan baik atas limpahan rahmat dan karunianya yang telah diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi Kebijakan Rumah Pemandokan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 Tentang Rumah Pemandokan di Kabupaten Jember (Studi Kasus Tentang Ijin Usaha Rumah Pemandokan Berdasarkan Pasal 4), skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswandi, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs Sasongko M,Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi;
3. Ibu Dra. Inti Wasiati. MM selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Bapak Drs Agus Suharsono. M,Si selaku dosen pembimbing I atas bimbingannya dan saran yang diberikan;
5. Ibu Selfi Budi Helpiastuti. S,Sos. Selaku dosen pembimbing II atas saran, bimbingan, dan dukungannya untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini;
6. Bapak Drs Agus Suharsono. M,Si selaku Dosen Wali;
7. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. Seluruh staff Dinas Sosial Kabupaten Jember.
9. Harian Pagi Radar Jember (group Jawapos) yang mendukung baik dalam penelitian ini maupun secara finansial;
10. Jiwa Ratna Dumilah,S.Sos yang selalu ikhlas memberikan semangat;

11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu karena terlalu banyak kawan-kawan yang mendukung dalam kehidupanku.

Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, desember 2010

penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Dan Manfaat	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Manfaat Peneltian	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Konsep Kebijakan	10
2.2 Konsep Implementasi Kebijakan	14
2.3 Model Implementasi Kebijakan yang Dikembangkan Oleh Van Meter Dan Horn	17
2.3.1 Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan	17
2.3.2 Sumber-Sumber Kebijakan	18
2.3.3 Kecenderungan Pelaksanaan	18
2.3.4 Karakteristik Badan-badan Pelaksana	19
2.3.5 Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana	20

2.3.6	Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik	21
2.4	Model Implementasi Kebijakan yang Dikembangkan oleh George C. Edward III	21
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN		29
3.1	Fokus Penelitian	30
3.2	Tipe Penelitian	30
3.3	Lokasi Penelitian	36
3.4	Penentuan Informan	37
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6	Teknik Pemeriksaan Data	41
3.7	Metode Analisa Data.....	43
BAB 4 PEMBAHASAN		46
4.1	Deskripsi Penelitian Dan Daerah Penelitian	46
4.1.1	Letak Dan Keadaan Geografis	46
4.1.2	Keadaan Penduduk (Demografis)	48
4.1.3	Keadaan Sosial dan Ekonomi	49
4.1.4	Sarana dan Prasarana Kelurahan	52
4.1.5	Pemerintah Kelurahan	54
4.2	Gambaran Umum Dinas Sosial Jember	55
4.2.1	Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jember	55
4.3	Impelementasi Kebijakan Perda Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 4 Tentang Ijin Usaha Rumah Pemdokan	60
4.3.1	Tahapan Sosialisasi	63
4.3.2	Pendataan Penduduk	65
4.3.3	Kualifikasi Rumah Pemdokan	67
4.3.4	Pembinaan dan Pengawasan	69

4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Ijin Usaha	
Rumah Pemdokan di Kabupaten Jember	70
4.4.1 Kesadaran Masyarakat	70
4.4.2 Kordinasi atau Komunikasi antar Lembaga	73
4.4.3 Alokasi Anggaran Implementasi Kebijakan Ijin Usaha	
Rumah Pemdokan	76
4.5 Analisa Data	78
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	82
PEDOMAN WAWANCARA	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

	Halaman
1.1 Jumlah Rumah Pemandokan Di Kabupaten Jember	2
1.2 Jumlah Rumah Pemandokan Di Kelurahan Sumpalsari	3
1.3 Susunan Tim Teknis Ijin Usaha Ruma Pemandokan Kabupaten Jember	7
1.4 Jumlah Rumah Pemandokan Berijin Di Kelurahan Sumpalsari	9
4.1 Luas Wilayah Kelurahan Sumpalsari	43
4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	44
4.3 Tingkat Pendidikan Penduduk	45
4.4 Angkatan Kerja Kelurahan Sumpalsari	46
4.5 Jumlah Penduduk Wajib Belajar 9 Tahun	46
4.6 Tingkat Kesejahteraan Penduduk	47
4.7 Struktur Mata Pencaharian Penduduk	47
4.8 Prasarana Pemerintahan Kelurahan Sumpalsari	50
4.9 Matrik Hasil Analisis Data Implementasi Kebijakan Rumah Pemandokan Berdasarkan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2008 Tentang Rumah Pemandokan Di Kabupaten Jember	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter Dan Van Horn	29
2.2 Model Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III	32
4.1 Model Analisis Interaktif	40